

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SUAK LABU KECAMATAN KUALA
BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
PETANI PINANG 2018**

SKRIPSI



**SUGENG PRAMONO
SIP 152084**

**PEMBIMBING
Dr. A.A.MIFTAH, M.Ag
Dr. DEDEK KUSNADI, S.Sos. M.SI**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

2019

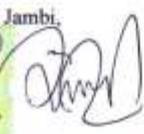
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Sulthnan Thaha Syaifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthnan Thaha Syaifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthnan Thaha Syaifuddin Jambi.

Jambi, 2019



SUGENG PRAMONO
NIM. SIP 152084

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Pembimbing I : Dr. A.A. Miftah, M.Ag
Pembimbing II : Dr.Dedek Kusnadi, S.Sos., M.SI
Alamat : Fakultas Syari'ah
UIN Sultho Thaha Syaifuddin Jambi

Jambi, 2019

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultho Thaha Syaifuddin Jambi
Di_
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperluanya, kami berpendapat bahwas kripsi saudara **Sugeng Pramono, NIM. SIP 152084** yang berjudul **"Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang"** telah dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sultho Thaha Syaifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat di terima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP.19731251996031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos, M.SI
NIP.198111072011011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

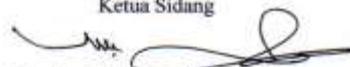
Nomor: In 08/DS/PP.00 9/ /2019

Tugas dengan judul "Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petanio Pinang". Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

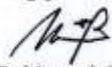
Nama : Sugeng Pramono
NIM : SIP.152084
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 13 Mai 2019
Nilai Munaqasyah : 73.385 (B)
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tim Munaqasyah/Tim Penguji:

Ketua Sidang


Drs. H. Amhar Rasyid, L.sc., MA
NIP. 1957012241988031001

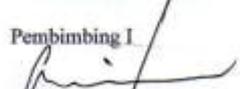
Penguji I


Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP.197609072006012004

Penguji II


Ulya Fuhaidah, M.SI
NIP.198208142011012006

Pembimbing I


Dr. A.A. Mittah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

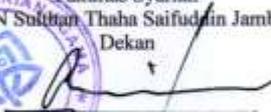
Pembimbing II


Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.SI
NIP. 1981111072011011005

Sekretaris Sidang


Dra. Chotiyah
NIP. 196605081994032001

Jambi, Mei 2019
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan


Dr. A.A. Mittah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالْءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S.an-Nisa/4:59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Sugeng Pramono; SIP.152084; Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.

Desa Suak Labu merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.597 Ha. Dengan luas wilayah tersebut, Desa Suak Labu memiliki perkebunan pinang kurang lebih seluas 850 Ha. Pinang merupakan pendapatan utama desa tersebut, namun pemerintah desa kurang perhatian terhadap petani pinang, padahal salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah desa. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang, serta mengetahui kendala, dan upaya apa yang di lakukan Pemerintah Desa Suak Labu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Penentuan informasi diperoleh dengan tehnik *purposive sampling*. Yakni Kepala Desa Suak Labu, Seketaris Desa Suak Labu, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun Dan Masyarakat. Sedangkan tehnik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang, walaupun terdapat kendala-kendala baik itu dari masyarakat, maupun dari sarana prasarana. Pemerintah dapat mengupayakan program-program yang telah disusun dan dapat menjadikan kehidupan masyarakat Desa Suak Labu lebih baik perekonomiannya kedepan.

Kata kunci : *Kebijakan Pemerintah, meningkatkan pendapatan petani pinang, Pupuk Bersubsidi, dan Kendala Pemerintah.*

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT

Taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberiku kekuatan ,
Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Shalawat dan

Salam selalu melimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta
pengalaman bagiku, yang telah memberiku warna warni kehidupanku.

Kubersujud dihadapan mu, engkau telah memberi aku kesempatan untuk bisa
sampai dipenghujung awal perjuanganku segala puji bagimu Allah, ungkapan
hati sebagai rasa terimakasih Ku persembahkan skripsiku ini kepada malaikat
nyataku yang tanpa mereka aku bukan lah sesiapa. tetes demi tetes keringat yang
di korbankan hanya untuk melihat putra-putrinya sukses.

Kepada ayahanda kuterucinta (Kusni) dan ibunda tercinta (Rolimah) dan AdindaKu
(Nur Alya Septia) Sesalau berdoa ya Allah berikan balasan setimpal surga
firdaus untuk kedua orang tuaku dan jauhkan mereka nanti dari panasnya api
nerakamu. Atas segala kekhilafan dan kekuranganku, Kurendahkan hati
serta meminta beribu ribu kata maaf tercurah .

Skripsi ini kupersembahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada hambanya ilmu dan menjadikannya berakal agar menjadi khalifah dibuminya ini. Sholawat serta salam taklupa pula kami haturkan kepada pembimbing umat kejalan Allah Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawakita dari zamanjahiliyah menuju zaman islamiyah yang dengan ilmu dan peradapan.

Dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang**”. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunan. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karnaitu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hadri Hasan, MA, Selaku rector UIN STS JAMBI
2. Bapak Dr. H.Su’aidi,MA., Ph.D, Bapak Dr.H.Hidayat M.Pd, dan Ibu Dr.Hj.Fadilah, M.Pd selaku wakil terktor I,II, dan III UIN STS Jambi
3. Bapak Dr.A.AMiftah, M.Ag selaku dekan syari’ah

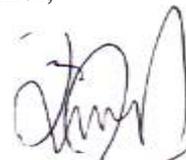
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Hermanto Harun Lc,M.HI.,Ph.D Ibu Dr.Rahmi Hidayati,S.Ag.,M.HI Ibu Dr.Yuliatin, S.Ag.,M.HI Selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkupan Fakultas Syari'ah UIN STS JAMBI.
5. Ibu mustiah RH, S.Ag.,M.Sy dan Ibu Tri Endak Karya lestiani, S.IP.,M.IP Selaku Ketua dan Seketaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN STS JAMBI
6. Bapak Dr.A.AMiftah, M.Ag dan bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos.,M.SI selaku pembimbing I dan II skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS JAMBI.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karna itu penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun demi kemajuan kita bersama di kemudian hari. Akhirnya penulis harapkan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi kitasemua. Amiiin .

Jambi, 2019



SUGENG PRAMONO
NIM.SIP 152084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
NOTA DINAS.....	
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	24
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	30
B. Jenis-Jenis Sumber Data.....	31
C. Unit Analisis.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Tehnik Analisis Data	36
F. Sistematika Penulisan.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

G. Jadwal Penelitian	40
----------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUAK LABU

A. Sejarah Dan Geografi Desa Suak Labu	41
B. Keadaan Sosial Masyarakat.....	43
C. Pemerintah Desa Suak Labu.....	44
D. Struktur Organisasi Desa Suak Labu.....	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.....	49
B. Kendala Yang dihadapi Oleh Pemerintah Desa Suak Labu dalam Menjalankan kebijakan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang	53
C. Upaya Yang Telah diLakukan Oleh Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITE

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Pendapatan Pinang Desa Suak Labu	4
TABEL 2 : Jumlah Penduduk Desa Suak Labu Tahun 2018.....	44
TABEL 3 : Penyebaran Penduduk Desa Suak Labu Tahun 2018	44
TABEL 4 : Pendapatan Masyarakat Petani Pinang tahun 2017 Dan 2018.....	45
TABEL 5 : Luas Perkebunan Desa Suak Labu	52
TABEL 6 : Data Pembuatan Jalan Stapak Desa Suak Labu Tahun 2018.....	54
TABEL 7 : Pembagian Pupuk Bersubsidi Oleh Pemerintah Desa Kepada Masyarakat	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.¹

Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi yang bisa di kembangkan, namun masyarakat kurang memiliki pengetahuan untuk menggali potensi yang ada. Hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh

¹ Muh. Firyal Akbar Dan Widya Kurniati Mohi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo" Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Horontalo, Vol. 3 No.2, Hlm.172

masyarakat untuk mengolah sumberdaya atau potensi alam yang dimiliki. Desa Suak Labu merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.597 Ha² dengan luas wilayah tersebut, Desa Suak Labu memiliki perkebunan pinang kurang lebih seluas 850 Ha, dan jumlah penduduk di tahun 2018 mencapai sebanyak 1115 dengan jumlah KK (kartu keluarga) 335.²

Pinang merupakan pendapatan utama masyarakat Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun pemerintah desa kurang perhatian terhadap petani pinang tersebut padahal salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah desa sebagian besar adalah dari hasil pendapatan penjualan pinang. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat bagaimana sistem penanaman, perawatan, dan pemberian pupuk yang baik sehingga bisa memberi hasil yang baik kedepannya.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Peran pertanian antarlain adalah (1) menyediakan kebutuhan bahan pangan yang di perlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, (2) menyediakan bahan baku industri, (3) sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, (4) sumber tenaga kerja yang membutuhkan modal yang di perlukan bagi pembangunan sektor lain, (5) sumber perolehan devisa, (6) mengurangi

² Arsip Desa Suak Labu, Tahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, dan (7) menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan hidup.³

Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 mengenai desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.⁴ Pemerintah Desa merupakan organisasi Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat lainnya.

Wilayah pedesaan merupakan wilayah terkecil dalam struktur kenegaraan Indonesia. Kebijakan pemerintah dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa beserta aparat desa lainnya. Kebijakan pemerintah desa menjadi penting serbagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai

³ Harianto, "Peran Pertanian Dalam Perekonomian Perdesaan" *Jurnal Pusat Study Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor*, Hlm. 1

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk meberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang yang efektif dan kokoh.⁵

Peranan dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Tabel 1.1

Pendapatan Pinang Desa Suak Labu

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	7360,000,000
2	2016	330,000,000
3	2017	300,000,000

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas pada tahun 2015-2017 pendapatan masyarakat petani pinang mengalami penurunan itu semua disebabkan dari berbagai permasalahan yang *Pertama* di sebabkan buah pinang yang mengalami pengurangan, kedua disebabkan inflastruktur yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurang memadai seperti jalan yang rusak dan jembatan yang putus, *Ketiga* di sebab kan oleh bos atau pembeli pinang nya kabur. Dari adanya penurtunan tersebut dibutuhkan kebijakan pemerintah Desa seperti penetapan jenis komoditas unggulan, penanganan penagulangan hama dan penyakit pertanian, penetapan jenis pupuk, yang paling penting adalah pembanguna jalan supaya masyarakat semakin mudah untuk akses keperkebunan.⁶

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang, dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SUAK LABU KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PETANI PINANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apa Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang Di Desa Suak Labu?

⁶ Peraturan Desa Suak Labu Nomor 8 Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Apa Kendala Yang dihadapi Oleh Pemerintah Desa Suak Labu dalam Menjalankan kebijakan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang?
3. Apa Upaya Yang diLakukan Oleh Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang?

C. Batasan Masalah .

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka kami sebagai penulis untuk membatasi bahasan penelitisan ini, yaitu menfokuskan hanya pada petani pinang.

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahdesa dalam meningkatkan pendapatan petani pinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana program pemerintah dalam memberikan pupuk bersubsidi terhadap petani pinang.
3. Untuk mengetahui apa kendala yang di temui pemerintah desa suak labu dalam menjalankan kebijakan pendapatan masyarakat petani pinang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kampus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan di perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Khususnya di Fakultas Syari'ah.
2. Bagi Desa, penelitian ini dapat meberikan Bahan masukan bagi pemerintah Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang.
3. Bagi mahasiswa umum, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁷

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai *yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau suatu yang harus dilakukan*. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau yang memberi perintah. Dari pengertian tersebut, dengan demikian apa perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Perbedaan ini menurut Taliziduhu Ndraha bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan kekuasaan. Sedangkan yang diperintah adalah orang atau kelompok orang yang menerima perintah tersebut, yang dalam istilah pemerintahan ketatanegaraan di sebut rakyat.⁸

Menurut Prabawa kesejahteraan sering diartikan luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumberdaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian

⁷ Ita Ulumiyah Dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)", *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 5*, Hlm. 3

⁸ Delly Mustafa, "*Birokrasi Pemerintah*", Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁹

Menurut Ibrahim, bahwasahnya pemerintah/pemerintahan sudah seharusnya menganut paradigma *customer driven* (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigm tersebut secara sistematis (sejak masukan-proses-keluaran hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan public yang berkualitas (yang sedapat mungkin *tangible, reliable, responsive, aman, dan penuh empati* dalam pelaksanaannya). Untuk itu diperlukan “aturan main” yang tegas, lugas, dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan kadang penuh ketidakpastian. Di sini terletak “seni dan ilmu pelayanan” yang harus dikembangkan pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat (dalam bahasa administrasi publik, harus ada integrasi dalam hal melaksanakan pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas) antara seluruh *stakeholders* pembangunan, yakni antara *stakeholder internal* (Sektor Publik = Sektor Pemerintahan) dan *stakeholders eksternal* (Sektor Swasta Dan Sektor masyarakat luas lainnya).

Menurut Saefullah, untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan

⁹. Rosni, ”Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Didesa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Fakultas Ilmu Social, Universitas Negri Medan, Vol.9.No.1* 2017 Hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum.¹⁰

Pemberian pelayanan public oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat. Karna itu, kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan public (*public service*) sangat strategis karna akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan sejauhmana negara negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan pendiriannya.¹¹

Dari kontek pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahuluan kepentingan umum, memepermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada public (publik=umum). Senada dengan itu, Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam memenuhi usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat.

¹⁰ Hardiyansyah, “*Kualitas Pelayanan Publik*”, Gava Media, 2011, Hlm. 14

¹¹ Ibid. Hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, penyediaan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 34 Tentang pelaksanaan dalam menyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah
- d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Profosional;
- f. Tidak mempersulit
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggaraan
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk metynghindari benturan kepentingan.

¹² Ibid. Hlm. 18

- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public.
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.
- n. Sesuai dengan kepantasan; dan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur.¹³

Tindakan atau perbuatan dalam pemerintahan lebih mengarah kepada kejahatan, memang mengalami kesulitan ketika kita ada posisi yang netral, tetapi bila kita berada pada posisi dipihak tertentu, maka label kejahatan itu sangat mudah mana yang melakukan kejahatan dan mana yang menentang kejahatan? Apabila yang mendukung kejahatan pasti jawabannya bukan melakukan kejahatan tapi memerangi kezhaliman, sedangkan yang menentang kejahatan jawabannya pasti mengatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang semacam itu adalah suatu tindakan kejahatan dan perlu dilakukan perlawanan sekaut mungkin dan harus dimenangkan, apabila mengalami kekalahan maka akan menghadapi kehancuran bagi penentang kejahatan. Sejalan dengan argumentasi ini bahwa kejahatan dalam pemerintahan secara garis besarnya ada lima kejahatan yang paling dominan berdasarkan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 Tentang Pelaksanaan Dalam Menyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan fenomena yang berkembang : (1) kejahatan dibidang ekonomi, (2) kejahatan dibidang jabatan (3) kejahatan dibidang teknologi, (4)kejahatan dibidang kekuasaan, (5) kejahatan dibidang politik.¹⁴

2. Kebijakan.

a. Pengertian kebijakan

Kebijakan public sebagai suatu wacana memiliki peluang untuk di ketahui dan dipahami karna sementara ini kebijakan publik dipandang sebagai bahan pembelajaran dengan mengandung cakupan pemikiran dan tindakan yang sangat luas jangkauannya, disamping itu bahwa kebijakan public menarik sejumlah bahan yang dijadikan objek penelaahan kebijakan public lebih tersusun secara rapi. Sebiagai objek penelaahan kebijakn public lebih menjurus kepada tuntutan –tuntutan masyarakat dalam memuaskan kehidupannya, disamping itu dibutuhkan korelasi-korelasi sosial yang signifikan dengan membentuk kesatuan tekad bulat dengan di tujukan suatu kekuatan jaringan sosial sedangkan sebagai bahan subjek penelaahan kebijakan public tentunya kita dapat melihat betapa banyaknya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang sifatnya sangat mendasar dan fundamental dengan membentuk perilaku dalam berintrasi dengan gaya masing-masing dalam rangka menyenangkan orang lain. Keterpaduan bahan baik yang berupa

¹⁴ Makmur, “Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”, Bandung, Refika Aditama, 2011. Hlm. 273-275

obyektif maupun subjektif penelaahan kebijakan public tujuannya menciptakan jaminan sosial dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Thomas R Dye menyatakan, kebijakan public sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan public yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karna mempunyai pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Mengacu pada Hagwood dan Gunn, menyatakan bahwa kebijakan public setidaknya mencakup hal-hal seperti: (1) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai, (2) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih, (3) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, (4) program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan, (5) keluar, yaitu apa yang nyata yang telah

¹⁵ Makmur, “*Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*”, Bandung, Refika Aditama, 2011. Hlm. 70-71

¹⁶ Agus Hiplunudin, “*Kebijakan Birikrasi Dan Pelayanan Public*”, Calpulius, Yogyakarta, 2017. Hlm. 24-25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.¹⁷

b. Konsep Kebijakan

Konsep yang berkaitan dengan kebijakan menentukan berbagai serangkaian pemahaman yang lebih luas dan mendalam pemaknaannya, terutama kita bisa melihat empat pasang rangkaian konsep kebijakan sebagai berikut: : (1) Konsep logika dan realitas. (2) Konsep abstrak dan kongkret. (3) Konsep actual dan teoritis. (4) Konsep dekriptif dan normative. Keempat rangkaian pasangan konsep yang berkaitan dengan kebijakan merupakan mekanisme atau siklus kebijakan itu sendiri dimana kita bisa mengaitkan dengan tindakan-tindakan dalam pembuatan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Pengaruh atau keterkaitan antara keempat pasangan konsep ini dalam setiap tahapan kebijakan baik yang peruntukannya kepada pihak public maupun peruntukannya kepada pihak privat atau dengan kata lain kaum swasta, kedua peruntukan tentang kebijakan ini sesungguhnya bisa menjadi ukuran dalam rangka menciptakan tingkat kepatuhan bagi masyarakat yang terikat pada pelaksanaan kebijakan sehingga mewujudkan keteraturan dalam berbagai interaksi.¹⁸

¹⁷ A.Syamsu Alam, "Analisis Kebijakan Public Kebijakan Sosial Diperkotaan Sebagai Sebuahkajian Implementatif", Vol.1 No. 3 Juni 2012. Hlm. 81.

¹⁸ Ibid. Hlm. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Model Kebijakan Pemerintah

Ada beberapa model pengambilan kebijakan pemerintah yang dikemukakan oleh Harold Laswel sebagai berikut:

1. Model Elit, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada orang elit tertentu yang dekat dengan penguasa. Oleh karna itu, lahirlah berbagai grub penekanan ataupun kelompok kepentingan.
2. Model kelompok, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada orang-orang sedang memegang posisi dominan. Oleh karna itu, dimanfaatkan oleh lingkaran penguasa formal stempat.
3. Model kelembagaan, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada lembaga seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif. Apabila bekerja sama akan tirani, tetapi bila terjadi *check and balances* akan demokrasi.
4. Model Proses, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada bagaimana rangkaian kegiatan dimulai yang dirancang dari indentifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Model Rasilisme, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada logika bagaimana lebih efisien dan efektif. Jadi, didasari *cost and benefit* jadi memperhitungkan kerugian dan keuntungan secara ekonomis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Model Inkriminalisme, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan masa lalu yang dimodifikasi tidak terlalu jauh dalam arti dilakukan tambah sulam seadanya
7. Model Sistem, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan dengan memperhatikan desana lingkungan mulai dari tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan, dengan perhitungan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala. Secara sistematis dicari berbagai masukan dan kemudian jelas apa yang menjadi hasil dalam nanti.¹⁹

d. Kejahatan Kebijakan

Telah dimaklumi bersama bahwa telah menjadi pendapat umum (*Public Opini*) didalam kehidupan masyarakat. Ada dua argumentasi perasaan terhadap sasaran utama kebijakan; *Pertama* sasaran yang bersifat positif, yaitu bagi orang yang merasakan memperoleh kebijakan atau keuntungan dalam kebijakan tersebut; *Kedua*, sasaran yang bersifat negative, yaitu orang yang merasakan adanya hambatan atau kesulitan terhadap pelaksanaan suatu jenis kebijakan.

Kejahatan dalam kebijakan senantiasa didentikan dengan kekerasan dimana sepak terjangnya senantiasa menghalalkan

¹⁹ Inu Kencana Syafie, “*Ilmu Pemerintahan*”, Bumi Askara, Jakarta .2015 . Hlm. 356-357

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

apapun yang mereka lakukan, dan oleh karna itu kejahatan memiliki berbagai jenis senjata. Sedangkan kebenaran dan kebaikan kebijakan tidak melakuka apapun, dan oleh karnanya senjata yang dimiliki sangat minim jika dibandingkan dengan kejahatan. Kejahatan kebijakan (*Policy Wickedness*) kita bisa membedakan atas empat kategori atau golongan tindakan kejahatan; *Pertama*, kejahatan pimpinan (*Leader Wickedneiss*); *Kedua*, kejahatan bawahan atau kejahatan staf (*Staff Wickedneiss*); *Ketiga*, kejahatan masyarakat (*Society Wekedness*); dan *Empat*, kejahatan pengusaha (*Entrepreneur Wickedness*). Keempat kejahatan dalam kebijakan ini secara realitas dewasa ini mengalami perkembangan cukup signifikan dan sangat meresahkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.²⁰

e. Ketepatan Dalam Kebijakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan merupakan sarana kehidupan manusia agar dapat hidup dengan teratur dan terjamin dari berbagai ancaman terutama ancaman kertidak teraturan intraksi antara sesama manusia untuk masing-masing mengejar pemenuhan kebutuhan hidup mereka, ketetapan dapat pertumbuhan atau perkembangan suatu jenis kebijakan biasanya mempunyai kecendrungan untuk menitik beratkan kepada pemenuhan keinginan setiap manusia.

²⁰ Ibid. Hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Memang didasari pula bahwa kebijakan merupakan implementasi dari pada kehendak pemegang kekuasaan, tetapi namun demikian bukan berarti semua kebijakan berdasarkan kehendak penguasa itu selalu diartikan negative bahkan kita juga bisa melihat faktor positif nya, antara lain; (1). Ketepatan kebijakan berdasarkan keadilan, (2) ketepatan keadilan berdasarkan moralitas, (3) ketepatan kebijakan berdasarkan tujuan, (4) ketetapan kebijakan berdasarkan objek formal, (5) ketepatan kebijakan berdasarkan objek matrial,(6) ketetapan kebijakan berdasarkan kebenaran rasionalitas.(7) ketetapan kebijakan berdasarkan kebenaran emperikal, (8) ketepatan kebijakan berdasarkan konseptual.²¹

f. Kekeliruan Dalam Kebijakan

Manusia merupakan unsure utama dalam proses pengambilan suatu kebijakan oleh sebab itu adanya kebijakan yang keliru sebenarnya sangat ditentukan oleh peranan manusia baik yang berperan sebagai pemberi informasi atau keterangan maupun manusia yang berperan sebagai pengambil suatu kebijakan. oleh sebab itu sebaiknya kita memberikan pemikiran secara singkat mengenai kekeliruan dalam kebijakan; (1) kekeliruan berpikir dalam kebijakan (2) kekeliruan bertindak dalam kebijakan, (3) kekliruan menganalisis dalam kebijakan, (4) kekeliruan

²¹ Makmur, “*Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*”, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hlm. 80-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkolaborasi dalam kebijakan, (5) kekliruan bernegosiasi dalam kebijakan, (6) kekeliruan merumuskan suatu kebijakan, (7) kekeliruan berkomunikasi dalam kebijakan.²²

3. Pendapatan.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sadono Sukirno dalam teori ekonomi mikro bahwa pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya factor produksi atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu.²³

Menurut Sukirno, pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa

²² Ibid. Hlm. 84

²³ Siti Nurrohmah, "Analisis Produksi Dan Pendapatan Patani Padi Sawah Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan". *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari* 2016. Hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.²⁴

Untuk memperjelas pengertian tentang pendapatan, dikemukakan pengertian pendapatan dari para ahli:

Menurut Sadono Sukirno dalam teori ekonomi mikro bahwa pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya factor produksi atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya Winardi, mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan modal atau kekayaan.²⁵

4. Pinang

Pinang (*Areca catechu L.*) merupakan tanaman famili *Areceae* yang dapat mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus bergaris tengah 15 cm. Buahnya berkecambah setelah 1,5 bulan dan 4 bulan kemudian mempunyai jambul daun-daun kecil yang belum terbuka. Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan berbuah pada umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah.

²⁴ Fatmawati, “ Analisis Pendapatan Petani Padi Didesa Teep Kecamatan Lagoan Timur”. *Jurnal Emba Vol. 1 No. 3 Iseptember 201*. Hlm. 992.

²⁵ Ibid ,Hlm. .17

Bagian-bagian dari tanaman pinang antara lain: (a). Akar: berakari serabut, putih kotor. (b). Batang: tegak lurus dengan tinggi 10-30 meter, bergaris tengah 15 cm, tidak bercabang dengan bekas daun yaing lepas. (c). Daun: majemuk menyirip tumbuh berkumpul di ujung batang membentuk roset batang. (d). Bunga: tongkol bunga dengan seludang panjang yang mudah rontok, keluar dari bawah roset daun, panjang sekitar 75 cm, dengan tangkai pendek bercabang rangkap. (f). Biji: biji satu, bentuknya seperti kerucut pendek dengan ujung membulat, pangkal agak datar 5 dengan suatu lekukan dangkal, panjang 15-30 mm, permukaan luar berwarna kecoklatan sampe coklat kemerahan, agak berlekuk-lekuk menyerupai jala dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan. Pinang memiliki nama daerah seperti pineng, pineung (Aceh), pinang (Gayo), batang mayang (Karo), pinang (Toba), batang pinang (Minangkabau), dan jambe (Sunda, Jawa).

Tanaman pinang berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 25-30 tahun. Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji tampak perisperm berwarna coklat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tua dengan lipatan tidak beraturan menembus endosperm yang berwarna agak keputihan.²⁶

Tanaman pinang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Jambi di samping komoditas yang lain, seperti tanaman kelapa sawit, karet dan kelapa. Sihombing mengemukakan bahwa komoditas pinang dapat menjadi andalan sebagai usaha bergengsi karena memiliki keunggulan sebagai berikut : a) Mudah memperoleh bibit, b) Jarang diganggu hama dan tanaman penyakit, c) Mampu berproduksi walaupun hanya di tanam di pekarangan, d) berbuah tanpa mengenal musim, e) Jarak tanam relatif dekat, f) biaya investasi tidak mutlak besar. Kabupaten Tanjung Jabung barat merupakan salah satu kabupaten penghasil tanaman pinang di Provinsi Jambi. Kondisi lahan di daerah .

Desa Suak Labu yang terletak di kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lahannya adalah pasang surut. Ini berarti tanahnya cocok untuk pertumbuhan pinang, karena tanaman pinang dapat tumbuh baik pada tanah yang banyak mengandung humus.

Menurut Utomo, dkk masalah yang paling mendasar bagi mayoritas petani Indonesia saat ini adalah dalam melakukan negoisasi harga produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha peningkatan

²⁶ Annisa Rahmai Chamima, "Inhibisi Ekstrak Biji Pinang (*Areca Catechu* L) Terhadap Pelepasan Ion Fosfor Pada Proses Demineralisasi Gigi Yang Distimulasi *Streptococcus Mutans*", *Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember* 2012, Hlm .5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendapatan petani. Lemahnya posisi tawar petani pada umumnya disebabkan para petani kurang mendapatkan akses pasar dan informasi pasar. Petani kesulitan menjual hasil komoditasnya karena tidak mempunyai jalur pemasaran sendiri, sehingga para petani akan lebih memilih menjual langsung komoditasnya kepada pedagang pengumpul desa (PPD), bahkan kepada para tengkulak.²⁷

G. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang dilakukan oleh Muh. Filyar Akbar dan Widya Kurniati Mohi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung Didesa Dulohope Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*” metodologi yang di gunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Didesa Dulohope Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan dengan baik secara aspek lain belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Peran pemerintah Desa Dulohupa yang telah dilaksanakan yakni: Mendatangkan penyuluh pertanian dengan

²⁷ Dedi Rahman Dkk, “Analisis Tataniaga Pinang (*Areca Catechu.L*) Pada Pasar Produsen Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Alimni Program Study Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi*, Sosio Ekonomika Bisnis Vol 17, (2) 2014 , Hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan sosialisasi tatacara penanaman jagung, tetapi masih banyak aspek-aspek yang perlu tentang waktu pelaksanaan sosialisasi dan bentuk sosialisasi dalam bentuk kebun percontohan yang dilaksanakan oleh aparat.

Perbedaan penelitian Muh. Filyar Akbar dan Widya Kurniati Mohi dengan penelitian sekarang adalah penelitian Muh. Filyar Akbar dan Widya Kurniati Mohi lebih berfokus pada cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani jagung sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada kebijakan pemerintahnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang.

2. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Bintoro Mahasiswa Pertanian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan” metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat dekriftif.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini, dinas pertanian Kabupaten Seragen dalam mendorong pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan di Kabupaten Seragen yang telah dilakukan dengan sesuai dengan renstra 2011-2015 banyak sekali aspek-aspek yang harus dilakukan oleh dinas pertanian untuk mensukseskan program pembangunan pertanian, mulai dari aspek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

reveytalisasi lahan, pembenihan, sarana dan prasarana, permodalan petani dan teknologi.

Perbedaan penelitian Bintoro dengan peneliti sekarang Bintoro meneliti tentang cara atau metode yang digunakan untuk mendorong pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan penulis mengali/meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang pada Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

3. Penelitian yang dilakukan Mohamad Ikbal mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Bisnis Universitas Tadulako Palu Tahun 2013 , yang berjudul : “ *Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Penda Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali* “ Metodologi yang digunakan kualitatif dekriftif.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa rata-rata pendapatan usaha petani padisawah petani responden musim tanam januari sampe dengan april 2013 di Desa Margaulya Kecamatan Baungku Barat Kabupaten Morowali sebesar Rp 12,625,470,-per ha. Hasil pengujian Chi-Square peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani di peroleh nilai Chi –square hitung besar (9,67) > Chi – Square tebal sebesar (7,78) pada taraf nyata (db ; a = 10) maka Ho dan Ha diterima dari hasil uji Chi-Square diketahui bahwa terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hubungan nyata antara peranan kelompok tani terhadap pendapatan usaha tani padi sawah.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Mohamad Ikbal. Dengan peneliti sekarang peneliti Mohamad Iknal meneliti lebih terfokus pada waktu penanaman dan hasil dari tanaman tersebut sedangkan penulis meneliti lebih ke kebijakan pemerintahannya.

4. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Feny M.G.Tulusan dan Very Y.Londa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi tahun 2014 yang berjudul : *“Peningkatan Pendapatan Masyarakat Bmelalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”* Metode yang digunakan adalah Kualitatif yang bersifat diksristif.

Penelitian ini membahas mengenai peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dilakukan berbagai program yaiku kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan motofasi kerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi. Program pemberdayaan di arahkan pada *enabling* yaitu terciptanya iklan yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat, *empowering* yaitu potensi potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi dan *protecting* yaitu potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat sebagai upaya menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perbedaan penelitian M. G. Tulus dan Very Y. Londa dengan penelitian sekarang peneliti M. G. Tulus dan Very Y. Londa meneliti tentang cara peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan sedangkan penulis meneliti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan.

5. Penelitian yang dilakukan Jumaini Sari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Sayari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017 yang berjudul : *“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari”* . Metodologi yang digunakan adalah kualitatif metode ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument pengumpulan data.

Penelitian ini mengenai Peran Dari Pemerintah Desa Rambutan Masam dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat . dan hasil dari penelitian ini terdapat kendala dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah Desa Rambutan Masam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kendalanya *Pertama* adanya pemungutan pajak pada masyarakat yang kurang mampu, *Kedua* kurangnya sarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan prasarana karna berjalannya suatu program itu harus diimbangi dengan tercukupya sarana dan prasarana, *Ketiga* karakter dan partisipasi masyarakat, karna berjalannya suatu pemerintahan harus ada partisipasi masyarakat. Solusi yang di lakukan oleh pemerintah desa rambutan masam dalam menagai permasalahan tersebut yaitu dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdes) yang mencakup semua bidang diantaranya : 1) Pembagunan Bidang Sarana dan Prasarana, 2) Pembangunan Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perternakan, Dan Kehutanan Yang Beroreantasi Kepariwisataan;.

Perbedaan penelitian Jaumaini Sari dengan penelitian sekarang peneliti Jumaini Sari fokusnya kepada semua perekonomian masyarakat Desa Rambutan Masam sedangkan penulis berfokus pada pertanian pinang saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dari aspek metodologi penelitian, penulis menggunakan pendekatan . Metode penelitian kualitatif sering disebut metodologi penelitian naturalistic karna penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturail setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karna pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif, karna data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁸ atau di artikan isebagai metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafu postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ailamiah, (sebagai lawannya adalah sksperimen) dimana peneliti sebiagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snawbaal*, tehnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penielitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*..²⁹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan hasil temuan lapangan berdasarkan

²⁸ Sugiono.”*Metode Penelitian Pendidikan Pendeikatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”,(Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 14

pengamatan pengumpulan data, dalam bentuk kata-kata yang akurat dan sistematis.

2. Setting dan Subjek Penelitian

Setting, dapat dipahami sebagai suatu keadaan atau tempat dimana subjek penelitiain itu berada. Sehubungan dengan itu penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Alasan menjaidikan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai setting penelitian adalah karna Desa Suiak Labu merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya miayoritas pendapatannya pinang.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data.

Menurut sumber pengambilannya, data dapat di bedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Praturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 129 / Perementan / OT .140 / 11 / 2014 Tentang Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang dan data-data lapangan hasil wawancara pemerintah.

Dalam penelitian ini data primer atau data pokok diperoleh dari hasil wawancara. Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang

dilakukan dengan observasi dan wawancara Kepala Desa Suak Labu, Seketaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur kesejahteraan, Kasi Wilayah, Petani Pinang Sebanyak (7) orang, dan pembeli pinang (1) orang dengan jumlah keseluruhan informan adalah 13 orang.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Ini diperoleh dengan cara mengutip narasumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti jurnal, internet, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

2. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang bersangkutan dalam masalah Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.³⁰ Dengan smpling kita memilih subjek (individu) atau

³⁰ Suhaimi Arikunto, "Metode Penelitian", Hlm. 143

(benda) yang diambil dari satu kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan gambar mengenai kesatuan atau keseluruhan tersebut.³¹

Dalam penelitian ini yang merupakan keseluruhan subjek penelitiannya adalah Kepala Desa Suak Labu Perangkat Desa dilingkungan Desa Suak Labu serta masyarakat petani pinang yang ada di Desa Suak Labu.

Untuk menentukan unit analisis data peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu subjek dari penelitiannya sudah ditentukan dan hanya diambil pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang mendalami dalam penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah: kepala Desa, Seketaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Wilayah, pembeli pinang (1) orang, dan petani pinang sebanyak (7) orang. Jadi keseluruhan informannya berjumlah (13) orang.

D. Tehnik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Observasi/Pengamatan

. Observasi/Pengamatan Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah desa dalam membina dan mengembangkan aktivitas kelompok tani. Dalam hal ini peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data.³²

³¹ Rianto Adi, “*Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*”, Jakarta, Ganit 2004. Hlm. 101

³² Erma Maria Tempuh, ” Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Tani Di Desa Batumbalango Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud”, *Pemerintah, Kelompok Tani*, Hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam satu penelitian. Karna menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan carar bertanya langsung bertatap muka (*pace to pace*). Namun demikian, tekhnik wawancara ini dalam perkembangan tidak harus dilakukan secara bertatap muka (*pace to face*), melainkan dapat vsaja dengan memanfaatkan secara komunikasi lain, misdalnya dengan telvon dan internet.

Selain dilakukan dengan tatap muka, wawancara juga dapat dilakukan melalui telpon, meskipun masih jarang dilakukan di indonesia. Untuk dapat melakukan wawancara dengan baik, pewawancara perlu mendapatkan pelatihan dan berpegang dengan pedoman wawancara yang khusus dikembangkan untuk itu. Fungsi pedoman wawancara adalah memberikan tuntunan dalam mengkomunikasikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang akan kita wawancarai. Pedoman wawancara harus di buat dengan bahasa yang sekomunikatif. Mungkin, responden tidak salah mengartikan pertanyaan sehingga jawaban yang di peroleh tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai dengan yang di inginkan peneliti.³³ Adapun petani pinang yang diwawancarai sebanyak (7) orang, yaitu Bapak Abdul Syakur (RT 08), Mismun (RT 07), Ahmad Asrori (RT 08), Nur Huda (RT 07), Parno (RT 08), Mustajab (RT 04), dan Bapak Saifudin Zuhri (RT 06).

c. Dokumentasi

Analisis sumber menggunakan dokumen merupakan metode yang utama dalam sebuah penelitian sosial dan kualitatif dalam hal ini melihat kebermaknaan sumber yang sesuai dalam strategi penelitian. Berkaitan dengan hal ini, Bell menjelaskan bahwa pemilihan dokumen untuk mendukung sebuah penelitian haruslah berhati-hati agar tidak memilih dokumen berdasarkan seberapa baik dokumen tersebut untuk mendukung hipotesis penelitian, melainkan haruslah membuat keputusan dan pilihan yang seimbang.³⁴

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa, dan apa saja kebijakannya yang sudah di buat.

³³ Duri Andriani Dkk, “*Metode Penelitian*”, Universitas Terbuka – Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015, Hlm. 5.12

³⁴Dian Maya Saputri, Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data, *Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*. Hlm. 6

d. Unit Analisis

Penelitian dilakukan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang pada Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan waktu penelitian di lakukan pada tahun 2018. Maka penelitian ini didasari dengan beberapa pertimbangan pokok yaitu:

1. Desa suak labu merupakan desa yang mayoritas penghasilannya petani pinang.
2. Desa suak labu mempunyai luas wilayah perkebunan pinang seluas 850 hektar dengan luas wilayah 5.597 Ha².³⁵

E. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan versi data tinggi sekali. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

a. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan untuk menentukan focus

³⁵ Arsip Desa Suak Labu

penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Data Selama di Lapangan

Analisis yang dikerjakan selama dilapangan dilaksanakan secara terus-menerus, sementara data dikumpulkan, merupakan upaya menetapkan data sebagai analisis data akhir sebelum peneliti meninggalkan lapangan. Terkait dengan hal tersebut Bogdan & Biklen menyarankan agar peneliti melakukan penelitiannya dengan baik, mengupayakan segera memutuskan untuk mempersempit bidang kajian. Pada mulanya peneliti berupaya melacak data sebanyak mungkin dan seluas mungkin dengan mencari berbagai objek fisik di medan penelitiannya untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang luas terhadap parameter latar, subjek, dan berbagai isu yang diminati. Akan tetapi, peneliti harus segera menyadarinya untuk segera pula mengembangkan fokus penelitian yang didasarkan atas dua hal, (1) apa yang mungkin dan mudah dikerjakan, dan (2) apa yang sebenarnya diminati.

kedua hal tersebut diperlukan untuk membatasi jangkauan pengumpulan data. Hal itu dapat diputuskan setelah tiga atau empat kali kunjungan atau setelah beberapa kali wawancara pendahuluan.³⁶

Peneliti dalam analisis dilapangan, harus menetapkan bentuk kajian yang ingin dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan rancangan yang akan

³⁶ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*”, Jakarta: Bumi Aksara 2014, Hlm. 223.

dipilih, seperti studi kasus organisasi, studi observasi, sejarah kehidupan, dan kajian budaya. Kegiatan pengumpulan data sangat tergantung pada rancangan yang di pilih, disamping pengalaman dibidang penelitian. Apakah yang dikehendaki peneliti? Misalnya, apakah peneliti ingin mendiskripsikan secara lengkap data penelitiannya, ataukah peneliti hanya tertarik untuk mengangkat teori mengenai aspek tertentu.³⁷

c. Menarik Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan penyajian sehingga dapat disimpulkan, dalam peneliti masih diperlukan untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data lapangan, dengan merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran, dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

F. Sistematika Penulisan.

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian ini. Sehingga dapat terlihat kesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini dalam V (lima bab)

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut

BAB 1 : Tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

³⁷ Ibid, Hlm. 224

BAB II :Tentang metodologi penelitian , Yakni berisi mengenai tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, dan instrument pengumpulan data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Tentang kondisi obyektif penelitian yakni mengenai sejarah desa suak labu, geografis, visi dan misi, dan struktur desa suak labu.

BAB IV : Tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang di Desa Suak Labu Kecamatan Kuala betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya tentang kebijakan Pupuk Bersubsidi Dan Kendala Pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

BAB V : Tentang penutup yang terdiri dari penutup dan kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018/2019																											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mai			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal	√	√	√																									
2	Pengajuan Proposal Dan Penunjukan Dosen Pembimbing						√	√																					
3	Konsultasi Dan Perbaikan Proposal								√	√																			
4	Seminar Proposal Dan Perbaikan Hasil Seminar														√	√													
5	Pengesahan Judul Dan Izin Riset																	√	√										
6	Pengumpulan Dan Penyusunan Data																						√	√					
7	Analisis Dan Penulisan Draf																								√	√			
8	Penyempurnaan Dan Pengandaan																												

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUAK LABU

A. Sejarah dan Letak Geografis Desa Suak Labu

1. Sejarah

Menurut keterangan Kepala Desa Suak Labu M. Nurman dengan kesempatan wawancara dengan penulis, menyatakan bahwa:

“Pemberian Nama Desa ini ditemukan pada tahun 1951 oleh KH.Zahrowi Tohir beliau adalah salah satu sesepuh didaerah tersebut. pemberian nama Desa Suak Labu yang di temukan oleh KH.Zahrowi Tohir ini karna pada zaman dulu terdapat sebuah sungai kecil yang diberi sebutan oleh masyarakat dengan nama suak dan pada daerah tersebut terdapat banyak tanaman buah labu yang tumbuh subur sehingga nama-nama tersebut di jadikan sebuah nama daerah yang disebut Desa Suak Labu yang berartikan tanah yang subur .”³⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa nama nama desa ini berasal dari adanya sebuah sungai yang kecil yang di beri nama dengan sebutan suak dan pada daerah tersebut juga terdapat banyak tanaman buah labu yang tumbuh subur yang ditanam oleh masyarakat. Pemberian nama desa ini dilakukan oleh seorang sesepuh dari daerah tersebut yang bernama Kyai H. Zahrowi Tohir.Pada kala itu kyai H. Zahrowi Tohir ini berkediaman di Parit Dua yang juga masih merupakan bagian dari Desa Sukan Labu, Kec.Kuala Betara Kab. Tanjab Barat.

³⁸ Wawancara Dengan M.Nurman, Kepala Desa Suak Labu, Tanggal 31 Januari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Letal geografis

Desa Suak Labu termasuk wilayah Kecamatan Kuala Betara dengan luas 5.597 Ha. namun dari keluasan wilayah begitu potensial saat ini masih banyak sumber-sumber daya alam yang berpotensi belum di gali.

Secara geografis Letak Desa Suak Labu berada di wilayah kabupaten tanjung jabung barat, terletak sebelah barat dari Kecamatan Betara, jarak Desa Suak Labu dengan ibukota Kecamatan Kuala Betara 33. KM., jarak dengan ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat 35. KM, dan jarak dari ibukota Provinsi 101.KM.

Desa suak labu memiliki batas alam, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Gebar Barat
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Jaya.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Teluk Sialang
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pematang Lumut.

Desa suak labu merupakan bagian wilayah kecamatan kuala betara dengan luas wilayah 185,89 Km².

3. Iklim

Keadaan iklim desa suak labu termasuk kategori beriklim sedang, dikatakan demikian karna pada siang hari tidak terlalu panas dan di waktu malam hari tidak terlalu dingin. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya berbagai wilayah atau tempat di provinsi jamb, maka keadaan musim hujan dan kemarau. Kondisi suhu pada siang hari mencapai 34^o C dan pada malam hari mencapai 22^o C.

Kalau di liat dari sinar matahari, biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan agustus merupakan bulan-bulan yang relative kering. Dimana penyinaranya lebih tinggi dari bulan November

sampai bulan februari itu relative basah. Sumber air bersih tergantung pada air hujan dan sumur penduduk. Desa suak labu sumber air bersih berasal dari turunya air hujan, sedangkan untuk mencuci dan mandi kebanyakan masih menggunakan air sumur dan air sungai.

B. Keadaan Sosial Masyarakat

1. Jumlah penduduk

Data mengenai jumlah penduduk Desa Suak Labu tahun 2018.

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Desa Suak Labu tahun 2018.³⁹

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	583
2	Perempuan	532
	Jumlah	1.115

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk di Desa Suak Labu dominan penduduknya berjenis kelamin laki-laki.

2. Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk Desa Suak Labu 8 (delapan) RT, dan jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Penyebaran penduduk Desa Suak Labu tahun 2018⁴⁰

NO	Nomor RT	Jumlah penduduk	Jumlah kk
1	01	283	75
2	02	107	27
3	03	177	55
4	04	127	38

³⁹ Dokumentasi, Balai Desa Suak Labu. 2018

⁴⁰ Dokumentasi, Balai Desa Suak Labu. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5	05	110	36
6	06	124	41
7	07	94	36
8	08	93	27
	Jumlah	1.115	335

3. Pendapatan Masyarakat Petani Pinang

Data 3.4

Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.⁴¹

NO	Tahun	Uraian	Keterangan	Hasil
1	2017	Penjualan pinang	175 kg/bulan	1.750.000
2	2018	Penjualan pinang	200 Kg/bulan	2.000.000

Berdasarkan data 3.4 diatas dimana pada tahun 2017-2018 pendapatan masyarakat petani pinang mengalami peningkatan sekitar 2,5% kalo di rupiahkan \pm Rp. 250.000.

C. Pemerintah Desa Suak Labu.

Penduduk Desa mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, karna mereka senasib sepenaggungan. Selain itu, mereka juga sering bertatap muka satu dengan yang lainnya, sehingga mereka saling mengenal betul bagaimana mereka mengenal dirinya sendiri. Keeratan hubungan penduduk desa tersebut, memeberikan ciri-ciri tersendiri bagi kehidupan di Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat 12

⁴¹ Wawancara Dengan Abdul Syakur, Petani Pinang, Tanggal 04 Januari 2019

menjelaskan bahwa desa adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memngurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional oleh pemerintah desa adalah urusan dalam hal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDes).⁴²

Demikian jugahalnya dengan Desa Suak Labu di pimpin oleh kepala Desa. Berjalan tidaknya suatu pemerintahan desa sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan serta kecakapan seseorang pemimpin. Sudah sama-sama dimaklumi bahwa mayoritas masyarakat belum begitu maju. Oleh karna itu untuk kelancaran tugas pemerintahan, maka kepala desa di bantu oleh sekretaris desa, kaur dan kaswil.

Desa Suak Labu mempunyai visi dan misi. Visi adalah pandangan umum tentang masa depan yang di wujudkan secara nyata sesuai dengan potensi dalam masyarakat yang harus didukung oleh berbagai elemen baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Sesuai letak geografis Desa Suak Labu di mana visinya adalah mencapai masyarakat adil dan makmur dalam keadilan yang akan di wujudkan dalam visi yang berbunyi : *“Bersama Membangun Desa “*

Misi merupakan pernyataan menetapkan tujuan intansi pemerintah dan sasaran yang ingin di capai.Pernyataan ini membawa organisasi

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

kepada suatu fokus. Adapun misi desa Suak Labu untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut di atas adalah ;

1. Pembangunan Bidang Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana
3. Pembangunan Bidang Agama
4. Pembangunan Bidang Pendidikan
5. Pembangunan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Perternakan.
6. Pembangunan Kesehatan Dan Lingkungan Hidup.
7. Pembangunan Bidang Sosial Hidup.⁴³

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya yang telah ditetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) setiap tahun, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa lima tahun.

Prioritas pembangunan desa diwujudkan dalam beberapa agenda pembangunan diantaranya:

1. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan perternakan.
2. Paket bantuan pembangunan desa yang masuk desa harus menyerap sejumlah tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa secara swakelola.
3. Peningkatan bantuan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat seperti bantuan bedah rumah dan renovasi dan sebagainya.
4. Peningkatan aksesibilitas dan kesehatan

⁴³ Profil Desa Suak Labu . 2017

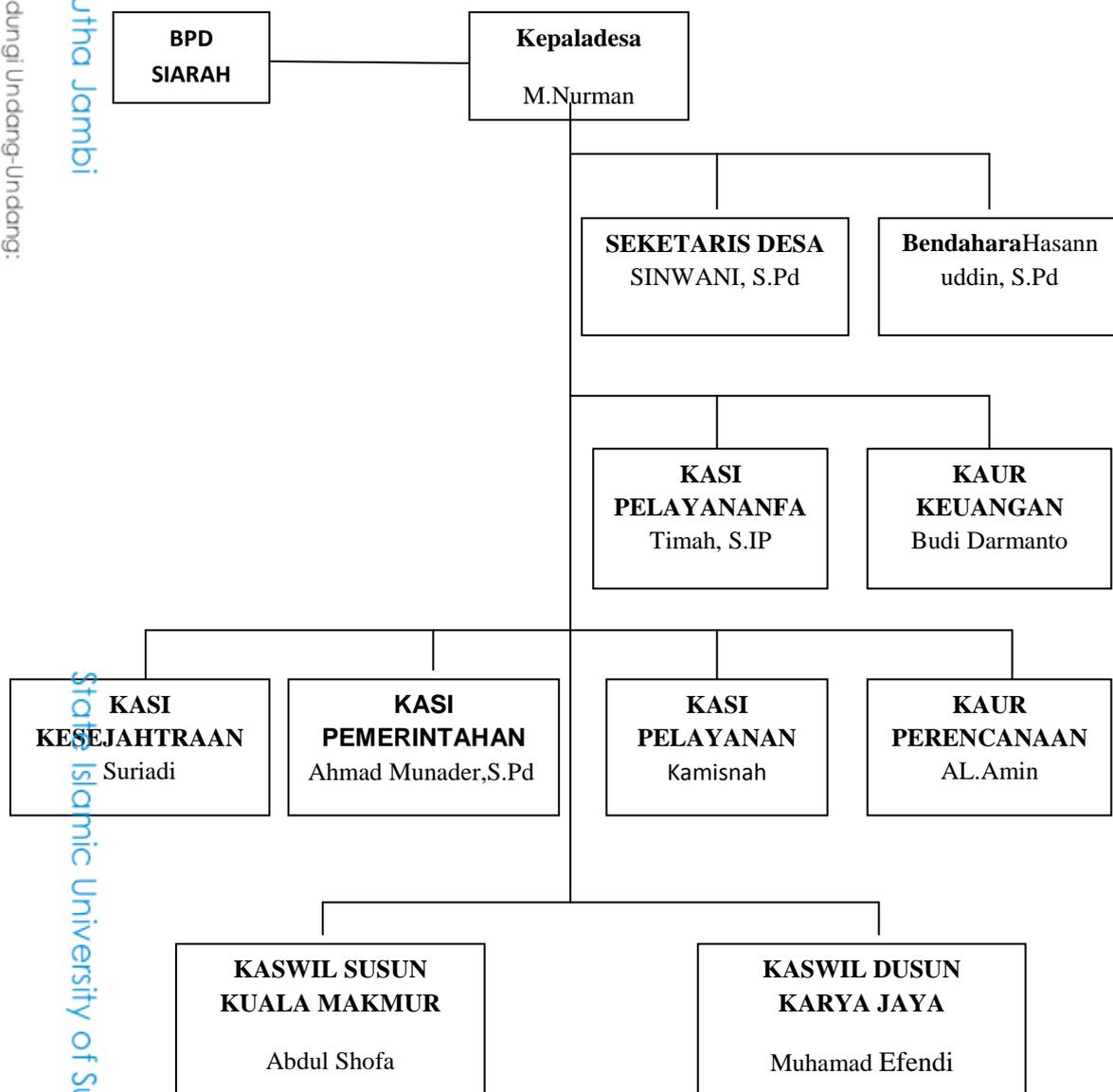
5. Peningkatan kapasitas perangkat desa dengan penguasaan administrasi, teknologi guna peningkatan pelayanan publik secara cepat dan sederhana.
6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana seperti masuknya jaringan PLN, dan pembanguana saluran air bersih.
7. Peningkatan bidang keagamaan melalui pengajian rutin yang dilaksanakan pada malam rabu dan malam jumat bersama Da'i desa.

D. Struktur Organisasi Desa Suak Labu

Setiap pemerintahan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Agar struktur pemerintrahan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka harus diatur suar suatu struktur organisasi yang merupakan kerangka kerja organisasi. Struktur organisasi akan mempermudah pimpinan mengawasi bawahannya dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugasnya, serta untuk memberi batasan yang jelas mengenai tingkat otoritas yang dimiliki oleh setiap tingkat devis. Berikut struktur organisasi pemerintahan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suak Labu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suak Labu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Peningkatan suatu perekonomian merupakan tujuan yang ingin di capai oleh seluruh masyarakat maupun pemerintahan. Tujuan akhir dari meningkatnya perekonomian adalah mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang merata bagi nseluruh masyarakat.⁴⁵

Jika penulis kaitkan dengan menyongsong dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat serta bervareasi (baik dalm bentuk primer, sekunder dan tersier). Maka keberhasilan merupakan impian nyata bagi masyarakat yang harus diwujudkan oleh seorang pemimpin. Keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian suatu desa/kelurahan ditentukan oleh pemangku kekuasaan yang berkuasa pada waktu yang di tentukan.

A. Kebijakan Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.

Kebijakan merupakan aspek dinamis dari ststus, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kebijakan tidak bisa di pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Tidak ada kebijakan tanpa kedudukan atau takada kedudukan tanpa kebijakan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka kebijakan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cet 1, (Jakarta: Icce Uin Syarif Hidayatullah, 2000), Hlm. 57.

peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴⁶

Untuk menunjang pendapatan masyarakat petani pinang, Pemerintah Desa Suak Labu melakukan banyak hal yaitu (1) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa, (2) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu, (3) penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan, dan (4) Pengembangan Benih Local. Kebijakan tersebut sudah di tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa Suak Labu Momor 08 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Desa Suak Labu (Paragraf 2 Pasal 4).⁴⁷Faktor yang mendasari Undang-Undang tersebut di Buat adalah:

- (1) kebutuhan masyarakat yang tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negri (Pemendagri), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbub).
- (2) Permasalahan yang sudah ada sejak desa tersebut berdiri.
- (3) Tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.
- (4) Sebagai legalitas keputusan musyawarah desa

Adapun tujuan di buatnya undang-undang nomor 08 tahun 2017 adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang keagamaan, ekonomi, dan budaya.

⁴⁶ Hendra Modong,(*Jurnal Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*), Diakses 27 Januari 2019.Hlm. 3.2

⁴⁷ Peraturan Desa Suak Labu Nomor 08 Tahun 2017

Pemerintah Desa Suak Labu dalam mewujudkan meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak M. Nurman selaku kepala desa suak labu.

“Pemerintah Desa Duak Labu, sangat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang, kami selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang kearah yang lebih baik sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat, melalui program-program yang sudah di tentukan dalam peraturan desa nomor 08 tahun 2017.”⁴⁸

Demikian pula yang disampaikan oleh bapak Sinwani, S.Pd. Selaku Seketaris Desa Suak Labu :

“kami pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang, setiap tahunnya kami mengadakan pelatihan seperti pelatihan KUEM, pelatihan pembuatan pupuk organic, dan pelatihan pembuatan pupuk kompos”⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintah Desa Suak Labu sudah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang sehingga akan tercapai kesejahteraan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah pusat.

Table 4.5

Luas Perkebunan Desa Suak Labu.⁵⁰

NO	Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Kelapa	116	Ha
2	Kopi	150	Ha
3	Pinang	850	Ha

⁴⁸ Wawancara Dengan M.Nurman, Kepala Desa Suak Labu, Tanggal 31 Januari 2019.

⁴⁹ Wawancara Dengan Sinwani, Seketaris Desa Suak Labu Tanggal 03 Februari 2019

⁵⁰ Profil Desa Suak Labu Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4	Kelapa Sawit	147	Ha
---	--------------	-----	----

Perkebunan pinang merupakan salah satu mata pencarian mayoritas masyarakat Desa Suak Labu. Akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Suak Labu yang memiliki keterbatasan dalam ilmu pengetahuan dibidang perkebunan.

Dengan hal tersebut sebagaimana yang diungkap oleh bapak Al.Amin sebagai kaur perencanaan, yaitu :

“Karena perkebunan pinang merupakan mayoritas masyarakat Desa Suak Labu, maka kami di sini sebagai kaur perencanaan Desa Suak Labu berupaya untuk bisa memenuhi segala sarana dan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat desa suak labu salah satunya dengan memberikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat, yang semua itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang”

Wawancara peneliti dengan bapak suriadi sebagai kasi kesejahteraan di Desa Suak Labu sebagai berikut :

“saya selaku kasi kesejahteraan memberikan peran yang sangat baiknya supaya pendapatan masyarakat petani pinang ada peningkatan yaitu melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Seperti contoh pembangunan jalan stapak di setiap RT supaya akses masyarakat semakin mudah dan cepat yang semua itu merupakan dari dana desa yang di kelola oleh pemerintah desa”⁵¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diatsas, bahwa pemerintah Desa Suak Labu sudah menunjang pendapatan masyarakat petani pinang melalui

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Al.Amin Selaku Kaur Pembangunan Desa Suak Labu , Tanggal 01 Februari 2019.

pembuatan jalan stapak, agar memudahkan masyarakat dalam kegiatan aktifitas sehari-hari.

Tabel 4.6

Data Pembangunan Jalan Stapak Tahun 2018.⁵²

NO	Jenis pembangunan	Sumber dana	Keterangan
1.	Jalan stapak	Dana desa	300 M. RT.06
2.	Jalan stapak	Dana desa	300 M. RT. 07
3	Jalan stapak	Dana desa	300 M. RT.08

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menggambarkan bahwa peran aktif pemerintah desa merupakan salah satu jalan untuk menunjang meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang yang lebih baik lagi, Pemerintah Desa Suak Labu sangat berperan aktif dalam keikutsertaannya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat petani pinang baik dalam perencanaan program maupun dalam pembangunan. Semua itu adalah salah satu bukti bahwa pemerintah desa telah berperan dalam menempatkan tupoksinya dalam suatu struktur pemerintahannya.

B. Kendala Yang dihadapi Oleh Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Menjalankan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang tidak terlepas dari

⁵² Dokumen File Desa Suak Labu Tahun 2018

berbagai kendala dan tantangan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

1. Susahnya Mencari Pupuk.

Kendala yang di hadapi pemerintah desa yang sangat dominan yaitu susahnya untuk mendapatkan pasokan pupuk yang bersubsidi.

Sesuai wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak sekretaris desa suak labu:

“salah satu kendala pemerintah desa yang sulit ditemukan adalah susahnya mencari pupuk bersubsidi tersebut dikarenakan selain susah dan juga harganya malah”⁵³

Dari wawancara di atas tersebut pemerintah terkendala di susahnya mencari pupuk bersubsidi karna selain susah mencarinya dan juga harga nya mahal .

2. Kurangnya Sarana Prasarana

Suatu kebijaksanaan berjalan lancar dan dapat mencapai semua target yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa seharusnya di dukung oleh sarana dan prasarana dalam bidang yang telah di tentukan. Kurangnya sarana dan prasarana dalam hal seperti akses jalan masyarakat, dengan kondisi jalan yang kurang memadai sehingga terkendala pada kebijakan pupuk bersubsidi yang telah dibuat pemerintah desa suak labu, oleh karna itu pemerintah sulit untuk mengontrol dan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat.

Seperti yang dikatana oleh Bapak Kepala Desa Suak Labu mengatakan bahwa:

⁵³ Wawancara Dengan Sinwani, Seketaris Desa Suak Labu Tanggal 03 Februari 2019

“kurangnya sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan jalan yang sering rusak, karna perbaikan yang kurang maksimal dan sebagainya membuat akses perekonomian masyarakat menjadi terlambat”⁵⁴

Berdasarkan pengamatan penulis beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat petani pinang didesa suak labu adalah terbatasnya sarana prasarana yang ada. Pembangunan infrastruktur terutama jalan yang rusak sehionga memperlambat akses masyarakat untuk kegiatan ekonomi.

3. Karakter Dan Partisipasi Masyarakat.

Demokratisasi desa juga terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa, pada dimensi inilah pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat berperan aktif untuk memebina dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak M.Norman selaku Kepala Desa Suak Labu mengatakan bahwa:

“yang menjadi kendala dalam program meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang saat ini adalah pada masyarakat itu sendiri dalam ke ikutsertaan atau partisipasi mereka terhadap program pemerintah desa karna masyarakat terkadang merasa bahwa pemerintah tidak adil, tetapi maksud dan tujuan pemerintah desa adalah supaya masyarakat petani pinang mendapatkan peningkatan pendapatnnya”⁵⁵

Dari wawancara di atas bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Suak Labu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani

⁵⁴ Wawancara Dengan M.Nurman, Kepala Desa Suak Labu Tanggal 01 Januari 2019

⁵⁵ Wawancara Dengan M.Nurman, Kepala Desa Suak Labu Tanggal 01 Januari 2019

pinangadalah dalam hal menanggapi komentar dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap apa yang sudah di programkan pemerintah, aakan tetapi maksud dan tujuan pemerintah itu untuk mewujudkan meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinangke arah yang lebih baik kedepannya.

C. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Desa Suak Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Pinang.

Salah satu bentuk kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah Desa Suak Labu yaitu pemerintah desa melakukan pembagian pupuk bersubsidi dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Desa Suak Labu, Tahun 2017 dan 2018 dengan rincian :

Tabel 4.7

Pembagian Pupuk Bersubsidi Oleh Pemerintah Desa Kepada Masing-Masing Kepala Keluarga.⁵⁶

No	Tahun	Kepala keluarga	Jumlah	Harga pupuk/sak
1	2017	320 KK	320 Sak	150,000
2	2018	335 KK	335 Sak	155,000

Berdasarkan tabel 4.7 di atas di mana pada tahun 2017 jumlah KK (kartu keluarga) berjumlah 320 KK, dan jumlah pupuk masing-masing KK mendapatkan satu sak pupuk dengan harga per sak nya Rp 150,000. Di mana pada tahun 2018 mengalami penambahan jumlah KK sebanyak 10 KK jadi

⁵⁶ Wawancara Dengan Sinwani, Seketaris Desa Suak Labu Tanggal 03 Februari 2019

total KK pada tahun 2018 mencapai 335 KK. Begitu juga juga terdapat peningkatan jumlah pembagian pupuk bersubsidi yang mencapai sebesar 335 sak dengan harga per saknya mencapai Rp 155,000.

Pupuk merupakan salah satu penunjang meningkatnya pendapatan masyarakat petani pinang di Desa Suak Labu. Akan tetapi masih bannyak kurangnya pemahaman masyarakatitu sendiri terhadap manfaat dan kegunaan pupuk pada tanaman pinang. Dengan hal tersebut sebagaimana yang diungkap oleh bapak abdul shofa sebagai kasi wilayah dusun kuala makmur, yaitu :

“Pupuk merupakan penunjang untuk mempersubur dan memperbaiki kondisi buah pinangmasyarakatDesa Suak Labu, maka kami di sini sebagai aparat pemerintah desa berupaya untuk bisa memenuhi segala sarana dan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat desa suak labu salah satunya dengan memberikan pupuk bersubsidi kepada masyarakat dalam satu tahun dua kali, yang semua itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang.”⁵⁷

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak abdul syakur sebagai petani pinang :

“memang sudah ada program pupuk bersubsidi yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat petani pinang, akan tetapi pupuk bersubsidi yang di berikan pemerintah masih sangat terbatas untuk semua pohon pinang yang ada di kebun”⁵⁸

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Mismun sebagai petani pinang:

“program pupuk bersubsidi yang di berikan pemerintah memang sudah ada akantetapi pupuk itu sangat terbatas mana mungkin satu karung pupuk

⁵⁷ Wawancara Dengan Abdul Syakur, Petani Pinang Tanggal 03 Januari 2019

⁵⁸ Wawancara Dengan Mismun, Petani Pinang Tanggal 3 Januari 2019

cukup untuk tanaman pinang satu hektar kalau bisa ya di perbanyak lagilah pembagiannya tiga atau lima sak per enam bulannya”⁵⁹

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Ahmad Asrori sebagai petani pinang:

“program pupuk bersubsidi yang diadakan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang sudah sangat membantu, itu semua adalah bentuk kepedulian pemerintah desa untuk masyarakatnya karna kalau masyarakat nya makmur pemerintah desa nya juga ikut makmur tidak pusing memikirkan masyarakat nya lagi dan bisa memikirkan krebijaka-kebijakan yang lain seperti pembanguna jalan permanen dan lain-lain.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Nur Huda sebagai petani pinang.

“program-program yang di buat pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang memang sudah Nampak yaitu seperti program pembagian pupuk bersubsidi, pelatihan KUEM, pelatihan pembuatan pupuk organic, dan pelatihan membuat pupuk kompos, itu semua sudah membantu kami sebagai petani pinang dan sekaran ini tinggal kami mau apa tidak untuk bekerja.”

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Parno Sebagai petani pinang:

“sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat petani pinang bukan hanya pembagian pupuk saja tetapi pemerintah desa membangun jalan stapak dimasing-masing RT dan itu semua bertujuan untuk mempermudah masyarakat menjalan kan perekomonian”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Mustajab sebagai petani pinang dan RT 04.

“ pola pikir setiap masyarakat itu berbeda-beda ada yang pola pikirnya masih awam sehigga sulit untuk menerima program-program yang di buat pemerintah desa dia merasa program itu tidak membantu dan masih merasa kurang. Akan tetapi pemerintah desa tidak ambil pusing yang penting pemerintah

⁵⁹ Wawancara Dengan Ahmad Asrori, Petani Pinang Tanggal 4 Januari 2019

desa sudah berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat mau diterima atau tidak tergantung masing-masing individu”

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Saifudin Zuhri sebagai petani pinang.

“kami sebagai masyarakat sangat berterimakasih kepada pemerintah desa sudah mberikan kebijakan seperti pembagian pupuk bersubsidi dan itu semua sangat membantu kami untuk meningkatkan pendapatan kami sebagai petani pinang ya meskipun pembagian pupuknya tidak banyak tapi itu sudah membantu setidfak nya pemerintah sudah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang”

Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintah Desa Suak Labu sudah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan petani pinang sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah Desa kepada masyarakat yaitu pembagian pupuk bersubsidi setiap dua kali dalam satu tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang.

Dari hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah Desa Suak Labu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang melalui Wawancara dan Observasi penulis ketika berada di Desa Suak Labu dan apa yang dipaparkan Oleh Kepala Desa Suak Labu, Seketaris Desa Suak Labu, Kasi Wilayah, Kasi-Kasi, dan Masyarakat Yang Berada di Desa Suak Labu, penulis hanya mendapatkan bahwasahnya kebijakan pemerintah desa dalam meningktkan pendapatan masyarakat petani pinang, yaitu:

1. Pemerintah Desa telah membagikan pupuk bersubsidi berdasarkan satu sak per kk (kartu keluarga) kepada masyarakat untuk menunjang banyaknya buah pinang.

2. Pemerintah desa sudah membuat program jalan stapak di setiap RT dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam akses perekonomian
3. Pemerintah Desa di tahun 2018 ini telah berhasil memasukkan jaringan listrik (PLN) kepada masyarakat, itu semua upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang
4. Pemerintah desa akan membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan produksi untuk akses ekonomi masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan skripsi tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Desa Suak Labu kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang adalah dengan cara mengadakan pelatihan KUEM, pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan pupuk kompos. Semua itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat petani pinang.
2. Kendalanya yang dihadapi oleh pemerintah desa Suak Labu menghasilkan kesimpulan bahwa yang menjadi tantangan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang merupakan kendala yang dari pemerintah Desa sendiri maupun pada masyarakat, seperti susahnya mencari pupuk bersubsidi, sarana dan prasarana dalam menunjang bkegiatan atau program yang telah dilakukan lalau kemudian permasalahan sosial masyarakat yaitu karakter dan partisipasi masyarakat itu sendiri itu semua dikarnakan rendahnya pendidikan masyarakat.
3. Sebagai pemerintahan Desa tentu banyak usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinannya dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan ketika Berada di Desa

Suak Labu dengan apa yang dipaparkan oleh responden bahwasanya upaya yang dilakukan pemerintah Desa Suak Labu sudah banyak dilakukan karna struktur ekonominya lebih dominan pada sektor pertanian, maka pemerintah Desa Suak Labu melakukan pembagian pupuk bersubsidi pada setiap masyarakat dan itu dilakukan dua kali dalam satu tahun dibagi per KK nya satu sak dengan harga persaknya di tahun 2017 Rp 150,000 dan 2017 Rp 155,000.

B. SARAN.

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan maka dapat dimuat beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa Suak Labu sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat dalam membuat program jangan sampai ada kecemburuan sosial antara masyarakat, sehingga tercapainya program pemerintah yaitu membuat masyarakat makmur dan sejahtera.
2. Bagi masyarakat Desa Suak Labu agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai sistem pemakaian pupuk yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani pinang agar lebih baik kedepannya.

C. PENUTUP.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta inayahNYA kepada penulis, sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi yang sederhana ini cukup banyak rintangan, namun atas limpahanNYA semua dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan

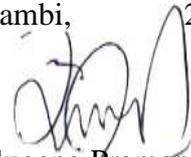
Menyadari bahwa didalam skripsi ini dengan banyak sekali ditemui kekurangan baik dalam bentuk tulisan maupun pemikiran, suku kata yang kurang tepat, hal ini kurangnya pengetahuan penulis tentang hal tersebut.

Dengan harana dan rendah hati, kepada pembaca kiranya dapat memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnannya skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada ALLAH SWT, penulis meminta rahmat dan hidayahnya.

Amin Ya Robbal Alamin.

Jambi, 2019



Sugeng Pramono
SIP 152084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Pustaka

A. Literatur

- Agus Hiplunudin, *“Kebijakan Birikrasi Dan Pelayanan Public”*, Calpulus, Yogyakarta, 2017.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cet 1, (Jakarta: Icce Uin Syarif Hidayatullah, 2000
- Delly Mustafa, *“Birokrasi Pemerintah”*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014
- Duri Andriani Dkk, *“Metode Penelitian”*, Universitas Terbuka – Kementrian Riset, Tehnologi, Dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2015
- Hardiyansyah, *“Kualitas Pelayanan Publik”*, Gava Media , 2011
- Hardiyansyah, *“Kualitas Pelayanan Publik”*, Gava Media , 2011
- Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek”*, Jakarta: Bumi Aksara 2014
- Inu Kencana Syafiie, *“Ilmu Pemerintahan”*, Bumi Askara, Jakarta . 2015
- Inu Kencana Syafiie, *”Sistem Pemerintahan Indonesia”* , Pt Asdi Mahasatya, Jakarta, 2011
- Makmur, *“Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Makmur, *“Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Sugiono.”*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Supardi, ”*Aplikasi Statistika Dalam Peneliotian*” , Pt.Ufuk Publishing House, 2012

Taufiqurohman, “*Kebijakan Public Pendelegasian Tangung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*”, (Jakarta : Fakultas Ilmu Social Dan Politik Universitas Moestopo Bragama (Pers) 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Desa Suak Labu Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Desa, Pasal 3 Ayat (4).

Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 Tentang Pelaksanaan Dalam Menyelengaraan Pelayanan Publik.

Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 Tentang Pelaksanaan Dalam Menyelengaraan Pelayanan Publik.

Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

C. Lain-Lain

Annisa Rahma Chamima, “Inhibisi Esktrak Biji Pinang (*Areca Catechu L*) Terhadap Pelepasan Ion Fosfer Pada Proses Demineralisasi Gigi Yang Disti mulasi *Streptococcus Mutans*”, *Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember* 2012.

Dedi Rahman Dkk, “Analisis Tataniaga Pinang (*Areca Catechu.L*) Pada Pasar Produsen Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Alimni Program Study Agribisnis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Sosio Ekonomika Bisnis Vol17, (2) 2014.

Erma Maria Tempuh, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Tani Di Desa Batumbalango Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud", *Pemerintah, Kelompok Tani.*

Fatmawati, " Analisis Pendapatan Petani Padi Didesa Teep Kecamatan Lagoan Timur". *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013.*

Harianto, "Peran Pertanian Dalam Perekonomian Perdesaan" *Jurnal Pusat Study Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.*

Hendra Modong, (Jurnal Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa), *Diakses 27 Januari 2019.*

Ita Ulumiyah Dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumber pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)", *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 5.*

Muh. Firyal Akbar Dan Widya Kurniati Moh, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jangung Di Desa Dulo hupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Vol.3 No.2.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rosni, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Didesa Dahari Tingkat Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Fakultas Ilmu Social, Universitas Negri Medan, Vol.9.No.1* 2017.

Siti Nurrohmah, "Analisis Produksi Dan Pendapatan Patani Padi Sawah Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan". *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendar* 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



Nama : Sugeng Pramono

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Baru, 29 April 1997

NIM : SIP 152084

Alamat

1. AlamatAsal : Kuala Baru Desa Suak Labu Kecamatan
Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

2. AlamatSekarang :Banyumas RT 21 Desa Mendalo Darat
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi.

No. Hp : 085381277546

Pendidikan Formal

a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 118/V Makmur Jaya, 2009

b. Madrasah Tsanawiyah : MTS Mafatihul Huda, 2012

c. Madrasah Aliyah : MAS Mafatihul Huda, 2015

Pengalaman Organisasi

a. Resimen Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

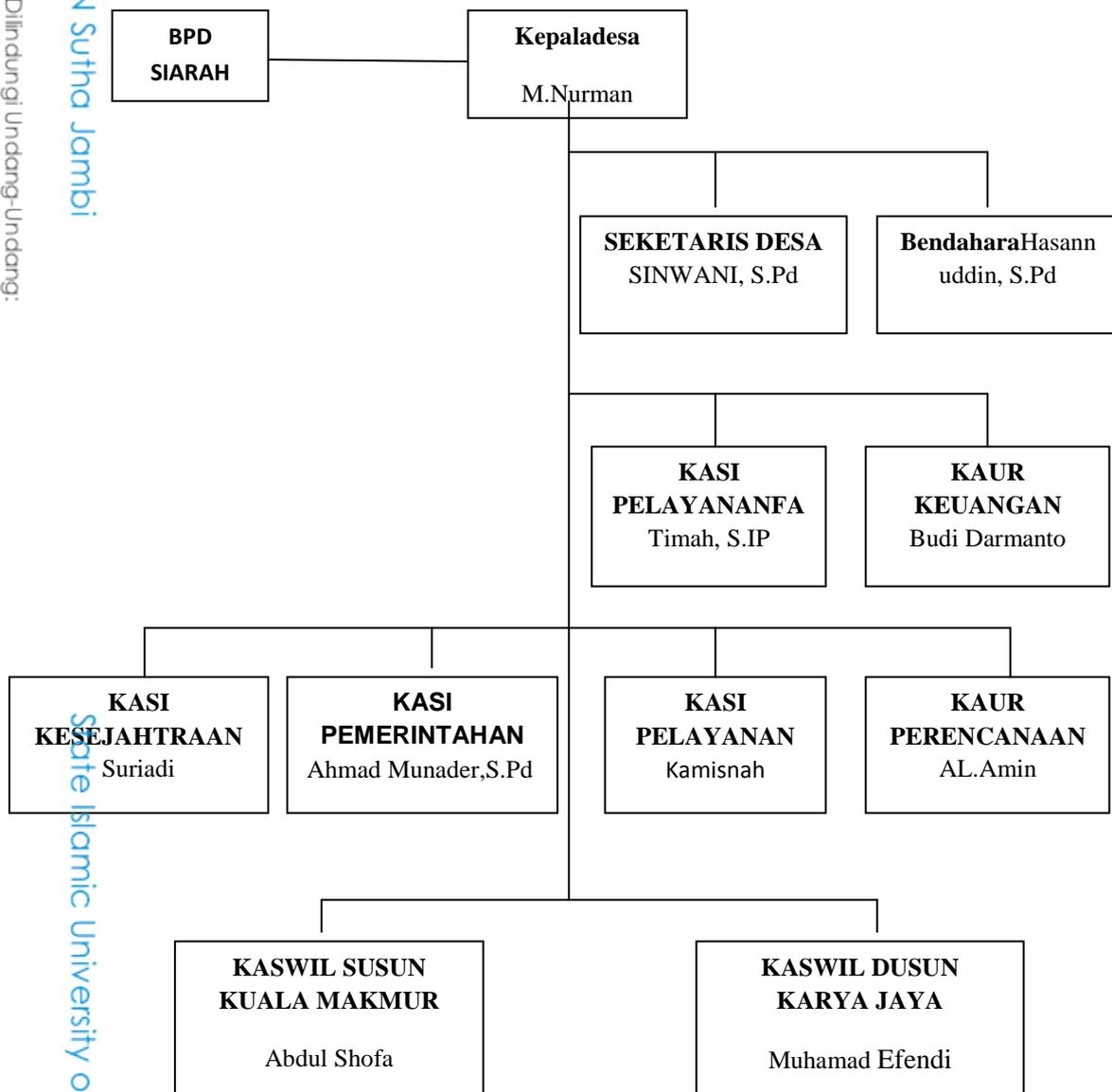
DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	RT	PEKERJAAN
1	M.Nurman	03	Kepala Desa Suak Labu
2	Sinwani, S.Pd	03	Sekretaris Desa Suak Labu
3	Al.Amin	03	Kaur Perencanaan
4	Suriadi	07	Kasi Kesejahteraan
5	Abdul Shofa	08	Kasi Wilayah Dusun Kuala Makmur
6	Abdul Syakar	08	Petani Pinang
7	Mismun	07	Petani Pinang
8	Ahmad Asrori	08	Petani Pinang
9	Nur Huda	07	Petani Pinang
10	Parno	08	Petani Pinang
11	Mustajab	04	Petani Pinang
12	Saifudin Zuhri	06	Petani Pinang
13	M.Nasir	06	Pembeli Pinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

STRUKTUR ORGANISASI DESA SUAK LABU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi